

Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Kepesertaan JKN pada Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja: Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023

Putra, Andi Eka

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=137969&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendahuluan: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib diperoleh bagi seluruh masyarakat dan dijamin oleh negara melalui pencapaian UHC. Dalam rangka mencapai UHC, Indonesia memulai program asuransi sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Beberapa tahun awal, program JKN mengalami defisit walaupun mengalami surplus di masa COVID-19, namun diprediksi akan mengalami defisit kembali akibat biaya kesehatan dan utilitas dari layanan kesehatan yang semakin meningkat. Dengan tujuan agar program JKN dapat berkelanjutan, maka penting untuk memperhatikan faktor pengumpulan dana, pooling risiko, serta pembelanjaan kesehatan yang efisien. Dana yang terkumpul sangat bergantung pada status keaktifan kepesertaan. Khususnya pada peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan segmen yang paling tinggi ketidakaktifan status kepesertaannya. Tujuan: Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi status keaktifan kepesertaan JKN pada segmen tersebut agar pengumpulan dana dapat dimaksimalkan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Melalui persamaan logistic model Logit untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil: Total sampel 589.529 orang, didapatkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, domisili di luar negeri, perempuan, usia muda, peserta yang memilih hak kelas kepesertaan I dan II, serta peserta yang memilih Puskesmas memiliki probabilitas status kepesertaan tidak aktif secara signifikan. Hanya frekuensi utilisasi FKTP, FKRTL dan peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama dan yang belum kawin memiliki probabilitas status kepesertaan aktif secara signifikan. Kesimpulan: Perlunya kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan dalam meningkatkan status kepesertaan JKN agar mampu menyelenggarakan program JKN yang berkelanjutan

Introduction: Health is a basic need that must be obtained by the entire community and is guaranteed by the state through the achievement of Universal Health Coverage (UHC). In order to achieve UHC, Indonesia launched a social insurance program called the National Health Insurance (JKN) in 2014. In the initial years, the JKN program experienced a deficit, although it experienced a surplus during the pandemic of COVID-19, but it is predicted to experience a deficit again due to increasing healthcare costs and healthcare service utilization. In order for the JKN program to be sustainable, it is important to pay attention to the factors of fund collection, risk pooling, and efficient healthcare purchasing. The collected funds are highly dependent on the active membership status. Specifically, for the JKN participants in the Non-Wage Earners (PBPU) and Non-Workers (BP) segments, they have the highest inactivity rate in their membership status. Objective: Therefore, it is important to study the factors that influence the active membership status of the JKN program in Non-Wage Earners and Non-Workers segments in order to maximize fund collection. Method: This research was conducted using a cross-sectional method with secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data. The Logit logistic model equation was used to

find the relationship and probability of the influencing factors. Results: From a total sample of 589,529 people, it was found that all provinces in Indonesia except DKI Jakarta, domicile abroad or living abroad, female, young age, participants who choose class I and II membership rights, and who choose Puskesmas (primary health centers) have a significantly higher probability of inactive membership status. Only the frequency of utilization of primary healthcare facilities, referral healthcare facilities and participants who choose Clinics and those who are unmarried have a significantly higher probability of active membership status. Conclusion: The need for cross-sectoral collaboration and evaluation of several regulations of policies to improve JKN membership status in order to be able to organize a sustainable JKN program